

DAFTAR PUSTAKA

- Suryanto, Bambang Hermanto dan Mas Rasmini (2019). "Analisis Potensi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Salah Satu Pajak Daerah." *AdBispreneur* 3(3): 273.
- Adelia, Sisi dan Maskuri Suetomo (2023). "Proses Administrasi BPHTB Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pendapatan Kota Palu." 1: 53–62.
- Amrulloh, Adhinata dan Maulidyati Aisyah. (2024). "Analisis Efektivitas Penerapan Sistem E-Bphtb Pada Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Bagian Pelayanan." 2(1).
- Arham, Amardianto, dan Firmansyah (2021). "Kebijakan Pajak Selama Pandemi Covid-19 Di Kawasan Asia Tenggara." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 3(1): 1–9.
- Rozi dan Nisya (2011). " Pertimbangan Pemberian Pengurangan Pajak BPHTB Pada PANDEMI COVID-19." (1).
- Aslami dan Sari (2023). "Analisis Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Penerimaan Pajak Daerah Di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (Upppd) Kecamatan Koja Pada Tahun 2020-2022 .
- Ditasari, Rollis Ayu, and Rihan Mustafa Zahri (2021). "Simulasi Perpajakan Akuntansi." : 52.
- Fitriady, Erwan, Mohammad Effendy dan Mirza Satria Buana (2023). "Harga Jual Beli Dalam Akta Jual Beli (Ajb) Dikaitkan Dengan Pajak Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)." *Notary Law Journal* 2(3): 203–15.
- Hidayah, Nurul, Yulies Tiena Masriani dan Suroto Suroto (2021). "Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Terhadap Transaksi Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan." *Notary Law Research* 2(2): 93.
- Imam (2019). "Kontribusi Pajak Dalam Pemerataan Pembangunan Di Indonesia." *Jurnal Hukum* 13(November): 93–94.
- Iskandar, Agus (2021). "Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak Di Indonesia." *Keadilan Progresif* 11(2): 120.
- Iswara, Septia Jati dan Fitika Andraini (2022). "Sistem Verifikasi Bphtb Secara Online Terhadap Transaksi Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan Apabila

Terdapat Kurang Bayar PAJAK Septia Jati Iswara 1 , Fitika Andraini 2.”
Jurnal Cahaya Mandalika: 663–77.

Jamil, Ida Nur Asiah, Achmad Husain dan Yuniadi Mayowan (2016). “Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Periode 2011-2014).” *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* 15(1): 165–75.

Perda Nomor 12 Tahun 2010. “Pemerintah Kabupaten Madiun.” : 1–48.

Murjiyanto dan Samun Ismaya. 2016. “Menetapkan Pilihan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Dasar Penghitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23(1): 142–61.

Sari dan Rahayu (2020). " Potensi dan Efektifitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin . *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*

Brutu, Hutapea, Tobing dan Julita (2023). “ Implementasi BPHTB Sebagai Instrumen Pajak Daerah Dalam Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif* . vol 8 No. 6 Jumi 2024

“Perbup Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan BPHTB Kabupaten Madiun.Pdf.”

Saidah dan Kurniawan (2023). “Analisis Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Bandung " *vol. 2 No. 2 September 2023*

Pudihang, Morasa dan Gamaliel (2017). “Mekanisme Pemungutan Pajak Atas Peminjaman Hak Pada Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*

Putri, Widiati dan Athanaya (2021). “Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Kota Denpasar.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2(3): 450–55.

Reka Tia Vinola Ifanisari, Dkk. 2021. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Atau Bangunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Dalam Pendapatan Daerah.” *Jurnal PenKoMi:kajian pendidikan & Ekonomi* 4(1): 1–17.

Sari, Dymitri Hani Puspita, Kurnia Heriansyah dan Indah Masri (2018). “Analisis

Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Bphtb Dan Pbb-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor).” *Jurnal Wahana Akuntansi* 13(2): 176–93.

Sarnani (2022). “Optimalisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dalam Usaha Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar). *Jurnal Pelopor Manajemen Indonesia. voume 2 Nomor 1*

Sukmana, Satria Utama Teja, Raihan Tengku Mardi dan Aprila Niravita (2023). “Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Melalui Penerapan Peraturan Undang-Undang BPHTB: Tantangan Dan Peluang.” *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2(6): 190–206.

Tanjung, Ginting, Mathon dan Leviza (2024). “Kebijakan Bphtb Terutang Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Nias.” 2(1).

Wadhiah dan Faisol (2023). “E-Bphtb: Strategi Meningkatkan Penerimaan Bphtb Selama Pandemi Covid-19.” *Value* 4(1): 1–12.

Widhiasa, Arthanaya, Suryani (2020). “Penentuan Nilai Pemungutan Pajak Bea Perolehan Peralihan.” *Jurnal Preferensi Hukum* 1(2): 57–61.

Yusran dan Siregar (2017). “Pengaruh BPHTB Dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau.” *Jurnal Akrab Juara* 2(2): 73–84.

Zulfikar, Anshari, dan Rachman (2021). “Penyelesaian Masalah Sanksi Praktik Pembantuan Pembayaran BPHTB Oleh PPAT Kepada Wajib Pajak.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5(1): 49–62.